

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia di mana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, di satu sisi perubahan tersebut telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan.

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari hal tersebut, pemerintah telah dan terus berupaya mewujudkan berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pengembangan dan pelatihan bagi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya.

Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk menjadi bangsa yang cerdas, adalah suatu keharusan bagi penduduk Indonesia mengenyam pendidikan, dan hal itu telah diwujudkan dengan program wajib belajar sembilan tahun, karena pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang memiliki nilai strategis. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin perkembangan kelangsungan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Oleh karena itu variabel pendidikan adalah sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan.

Keberhasilan pendidikan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, akan ditentukan oleh banyak faktor, antara lain oleh peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, manajemen pendidikan dan fasilitas pendidikan. Di samping itu lingkungan juga akan sangat berpengaruh untuk mendukung keberhasilan sebuah pendidikan, terutama keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta (dunia usaha dan dunia industri sebagai pemakai lulusan pendidikan).

Sekolah sebagai lembaga formal pendidikan, tidak hanya sekedar menghasilkan output yang sekedar lulus dan mendapatkan ijazah saja, tetapi diharapkan memiliki kualitas sebagai manusia yang mampu bersaing dalam kehidupannya. Di sekolah sumber daya manusia dapat dikembangkan dengan

lebih terarah sesuai dengan spesifikasi tertentu. Oleh karena itu pendidikan yang diharapkan oleh semua pihak adalah pendidikan yang bermutu. Sekolah adalah organisasi pendidikan dengan kegiatan utama proses belajar mengajar. Ada beberapa komponen yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah, di antaranya adalah kepala sekolah dan guru. Agar mutu pendidikan terpelihara dengan baik, kepala sekolah dan guru harus mempunyai kompetensi profesional serta dedikasi dan prestasi kerja yang tinggi.

Bertitik tolak dari paparan di atas, secara normatif pemerintah mempunyai perhatian dan komitmen yang sangat tinggi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan di keluarkannya Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, yang terdiri dari lima kompetensi yaitu; kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi sosial. Dengan demikian seorang kepala sekolah diharapkan memiliki kompetensi sesuai Permendiknas tersebut, dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankannya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ketercapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada kecakapan dan kebijakan kepemimpinan kepala sekolah, karena kepala sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan bekerja sama dengan guru-guru dalam mendidik siswa dan menghasilkan output yang diharapkan.

Pemilihan komponen kompetensi kepala sekolah sebagai variabel yang dikaji dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu, mutu pendidikan menuntut kepemimpinan yang profesional di bidang pendidikan. Pembenahan mutu pendidikan harus dimulai pada pembenahan profesionalitas pemimpin (kepala sekolah). Kepala sekolah adalah orang yang dijadikan harapan tertinggi oleh para guru, staf, siswa dan orang tua siswa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kunci utama peningkatan mutu adalah komitmen pada perubahan, selalu berinovasi untuk mengembangkan diri serta mengikuti perkembangan dan tuntutan profesi. Oleh karenanya peningkatan mutu pendidikan sangat perlu didukung oleh pengelolaan manajemen pendidikan yang optimal oleh kepala sekolah.

Bervariasinya kebutuhan siswa akan belajar, beragamnya kebutuhan personil sekolah dalam pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah satu dengan lainnya, harapan orang tua atau masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak-anak mereka, dan tuntutan dunia usaha untuk memperoleh tenaga bermutu, berdampak pada keharusan bagi setiap individu terutama kepala sekolah untuk mampu merespon dan mengapresiasi kondisi tersebut di dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sementara, masyarakat dituntut partisipasinya agar lebih memahami pendidikan, sedangkan pemerintah berperan sebagai pendukung dalam hal menentukan kerangka dasar kebijakan pendidikan.

Sebagai wujud perhatian terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional, pemerintah mengeluarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2005 tentang delapan Standar Nasional Pendidikan yang harus dijadikan acuan dalam setiap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kedelapan standar tersebut adalah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan diharapkan setiap sekolah mampu mencapai mutu dengan indikator pencapaian setiap standar.

Mutu pendidikan di sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumber daya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan professional (Hadis dan Nurhayati, 2010: 3). Keseluruhan komponen seperti kualitas guru, kualitas kepala sekolah, hasil belajar, dukungan orang tua dan masyarakat, sumber belajar dan penerapan teknologi adalah sebagian hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pada semua jenjang pendidikan, namun demikian berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan mutu secara merata.

Banyak pihak berpendapat bahwa rendahnya mutu pendidikan merupakan salah satu faktor yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi tuntutan pembangunan bangsa di berbagai bidang. Sallis, (2008: 103-106), berdasarkan hasil penelitian Deming, mengelompokkan faktor penyebab kegagalan mutu pendidikan ke dalam dua faktor yaitu, faktor umum dan faktor khusus; 1) Faktor umum kegagalan adalah bersumber dari kegagalan sistem. Di antaranya adalah kegagalan berkenaan dengan rendahnya desain kurikulum, gedung tidak memadai, lingkungan kerja tidak menunjang, sistem dan prosedur kerja tidak cocok, pengaturan waktu tidak mencukupi, serta pengembangan staf tidak memadai. Hal ini bisa diatasi jika perubahan dibuat mengacu kepada sistem, proses dan prosedur pendidikan; 2) Faktor khusus adalah kegagalan pendidikan muncul karena prosedur dan peraturan tidak dipatuhi karena masalah komunikasi dan kesalahpahaman, staf tidak memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menjadi guru atau kepala sekolah, kurangnya motivasi, atau problem khusus berkaitan dengan setiap perlengkapan pelaksanaan pendidikan.

Tuntutan para *stakeholders* terhadap mutu pendidikan semakin tinggi, namun yang terjadi justru kemerosotan mutu pendidikan dasar, menengah, maupun tingkat pendidikan tinggi. Hal ini berlangsung akibat penyelenggaraan pendidikan yang lebih menitikberatkan pada aspek kuantitas dan kurang dibarengi dengan aspek kualitasnya. Peningkatan kualitas pendidikan ditentukan oleh peningkatan proses belajar mengajar. Dengan

adanya peningkatan proses belajar mengajar dapat meningkat pula kualitas lulusannya. Peningkatan kualitas proses pembelajaran ini sangat tergantung pada pengelolaan sekolah, dan kepemimpinan kepala sekolah terbukti mempengaruhi implementasi dan pemeliharaan perubahan dan berkorelasi dengan hasil belajar siswa. Pendidikan yang bermutu melibatkan berbagai input, mengelola proses pembelajaran yang efektif, melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar untuk bersama-sama peduli pada pendidikan. Dukungan orang tua menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik.

Dalam proses/kegiatan belajar mengajar di sekolah siswa dituntut untuk tidak sekedar mampu mengingat dan memahami informasi tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilannya secara kontekstual melalui beragam kompetensi. Di era pembangunan yang berbasis ekonomi dan globalisasi sekarang ini diperlukan pengetahuan dan keanekaragaman keterampilan agar siswa mampu memberdayakan dirinya untuk menemukan, menafsirkan, menilai dan menggunakan informasi, serta melahirkan gagasan kreatif untuk menentukan sikap dalam pengambilan keputusan.

Pencapaian standar mutu pendidikan, salah satunya ditentukan oleh proses kegiatan belajar mengajar, sehingga dalam pelaksanaannya difokuskan mengacu kepada empat standar dari delapan standar yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP), karena empat standar tersebut berhubungan langsung dengan proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Keempat standar tersebut adalah; 1) Standar Isi, mencakup lingkup

materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang terdiri dari kurikulum yang sesuai dan relevan, serta penyediaan kebutuhan pengembangan pribadi siswa; 2) Standar Proses adalah SNP yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, yang terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, sumber belajar di dapat dengan mudah, pembelajaran dilaksanakan dengan aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, sekolah memenuhi kebutuhan siswa serta sekolah selalu meningkatkan prestasi siswa; 3) Standar Penilaian adalah SNP yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar siswa, terdiri dari sistem penilaian, yang akan berdampak pada proses belajar siswa serta orang tua diharapkan ikut terlibat di dalam proses penilaian tersebut; 4) Standar Kompetensi Lulusan, mencakup didalamnya kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan, siswa mencapai target akademis yang telah ditetapkan, dan siswa dapat mengembangkan potensi sebagai anggota masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam upaya pencapaian standar mutu pendidikan, seperti pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka perbaikan proses belajar mengajar, pengembangan kurikulum, menetapkan standar minimal kelulusan, maupun penyediaan sumber belajar mengajar. Akan tetapi, dari fenomena yang ada di lapangan sulit dipungkiri masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan

dalam pelaksanaannya. Untuk membuktikan secara ilmiah yang didukung oleh data-data empiris tentang permasalahan atau kesenjangan antara harapan dengan kenyataan dalam upaya mengetahui sejauh mana kontribusi kompetensi kepala sekolah terhadap pencapaian standar mutu pendidikan di sekolah, maka dipandang perlu untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul “Kontribusi kompetensi kepala sekolah terhadap pencapaian standar mutu pendidikan di sekolah pada SMP/MTs se-kabupaten Jembrana”.

B. IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH

Peningkatan mutu pendidikan merupakan kebutuhan utama yang harus selalu diusahakan dan diperjuangkan oleh semua lembaga pendidikan dan komponen-komponen yang terlibat dalam sistem pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, apalagi jika dibandingkan dengan mutu pendidikan di Negara lain. Hasil Survey Political and Economy Risk Conculancy (PERC) yang dilakukan pada tahun 2000 tentang mutu pendidikan di kawasan Asia, menempatkan Indonesia di rangking 12 setingkat di bawah Vietnam (Hadis dan Nurhayati, 2010: 1).

Salah satu permasalahan yang dihadapi pendidikan Indonesia adalah rendahnya mutu, khususnya mutu pendidikan dasar dan menengah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengembangan kurikulum dan sistem penilaian pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan

peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya seperti di pinggiran kota bahkan di pedesaan belum berjalan maksimal.

Hal yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara signifikan dan merata adalah menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan tenaga kependidikan, pengadaan buku dan sumber belajar, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan telah terpenuhi, maka mutu pendidikan akan tercapai. Dalam kenyataannya mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi. Hal ini disebabkan karena terlalu memusatkan pada faktor input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan.

Penyebab lainnya adalah peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat input (dana) bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, penilaian dan akuntabilitas). Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, padahal masyarakat/orang tua siswa adalah salah satu unsur utama yang berkepentingan terhadap pendidikan. Hal ini sangat berarti agar kekuatan akuntabilitas sekolah dapat terkontrol, juga siswa berada pada jalur kualitas yang semakin berkembang signifikan dari indikator-indikator

pembelajaran yang dirumuskan oleh sekolah selaku penggerak dan penentu kualitas pembelajaran.

Setiap sekolah secara bertahap dikembangkan untuk menuju kepada pelaksanaan standar nasional pendidikan yang dijadikan acuan dalam pencapaian mutu pendidikan. Acuan ini bersifat nasional, baik dilihat dari aspek masukan, proses maupun lulusan. Pada dasarnya pagu mutu pendidikan nasional merupakan acuan minimal yang harus dicapai oleh setiap satuan dan atau program pendidikan (Badan Akreditasi Sekolah Nasional, 2004).

Kenyataan yang ada di lapangan belum tampak adanya perbaikan mutu pendidikan secara signifikan melalui usaha pengelolaan sekolah dengan menggunakan acuan standar mutu pendidikan yang seharusnya merupakan bagian penting dari kinerja kepala sekolah. Kinerja kepala sekolah ditentukan oleh kemampuan, keterampilan dan pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah dalam mengelola sekolahnya. Permasalahan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Fasli Jalal (<http://www.akhmadsudrajat.wordpress.com>) hampir 70% kepala sekolah tidak kompeten terutama dalam aspek manajerial dan supervisor.

Merujuk pada uraian permasalahan di atas adalah bagaimana mengelola kegiatan belajar mengajar dalam pencapaian standar mutu pendidikan dengan mengoptimalkan kinerja kepala sekolah melalui kompetensi yang dimilikinya. Pendidikan dilaksanakan melalui fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan kepemimpinan, pengkoordinasian dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan kepala

sekolah, diharapkan mutu pendidikan dapat terjamin kualitasnya. Maka jelaslah bahwa upaya menuju ke arah pencapaian mutu pendidikan saat ini, merupakan suatu kebutuhan yang mendasar. Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan di sekolah yang mempunyai andil sangat besar dalam mewujudkan mutu pendidikan. Berkembangnya semangat kinerja, kerjasama yang harmonis, minat terhadap perkembangan pendidikan, suasana kerja yang menyenangkan dan perkembangan kualitas profesionalisme guru banyak ditentukan oleh pelaksanaan kinerja kepala sekolah melalui kompetensinya.

Berdasarkan uraian dalam identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran umum kompetensi kepala sekolah di SMP/MTs se-kabupaten Jembrana?
2. Bagaimanakah gambaran pencapaian standar mutu pendidikan di sekolah pada SMP/MTs se-kabupaten Jembrana?
3. Bagaimanakah kontribusi kompetensi kepala sekolah terhadap pencapaian standar mutu pendidikan di SMP/MTs se-Kabupaten Jembrana?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kompetensi kepala sekolah memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pencapaian standar mutu pendidikan di SMP/MTs se-Kabupaten Jembrana. Tujuan secara spesifik dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran umum kompetensi kepala sekolah di SMP/MTs se-kabupaten Jembrana.
2. Untuk mengetahui gambaran pencapaian standar mutu pendidikan di sekolah pada SMP/MTs se-kabupaten Jembrana.
3. Untuk mengetahui kontribusi kompetensi kepala sekolah terhadap pencapaian standar mutu pendidikan di SMP/MTs se-Kabupaten Jembrana.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini secara umum adalah memberikan sumbangan pemikiran kepada pengambil kebijakan khususnya pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan memberikan masukan kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Bali untuk dapat melakukan pemetaan terhadap kompetensi kepala sekolah, yang kemudian dilakukan perbaikan dan peningkatan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

E. ASUMSI

Asumsi atau anggapan dasar merupakan pernyataan yang kebenarannya diterima oleh semua pihak sehingga dapat dijadikan kerangka dasar bagi proses suatu penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Riduwan (2006: 30), yang mengemukakan bahwa fungsi asumsi dalam sebuah tesis

merupakan titik pangkal penelitian dalam rangka penulisan tesis. Asumsi dapat berupa teori, evidensi-evidensi dan dapat pula pemikiran peneliti sendiri. Adapun asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menghasilkan pendidikan bermutu tidak lepas dari kompetensi kepala sekolah yang dimiliki sebagai sumber daya penggerak kinerja dalam pelayanan pendidikan.
2. Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan yang profesional di bidang pendidikan, dan pembenahan mutu pendidikan dimulai dari pembenahan profesionalitas pemimpin (kepala sekolah).
3. Pencapaian standar mutu pendidikan terwujud melalui proses kegiatan belajar mengajar yang bermutu.
4. Mutu pendidikan di suatu institusi pendidikan (sekolah), merujuk pada standar nasional pendidikan (Hadis dan Nurhayati, 2010: 76).

F. HIPOTESIS

● Bentuk hipotesis dalam penelitian ini merupakan hipotesis asosiatif yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2009: 69). Hipotesis dalam penelitian ini:

Kompetensi kepala sekolah memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pencapaian standar mutu pendidikan di SMP/MTs se-Kabupaten Jembrana.

G. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian deskriptif analitis, karena akan mengukur dan melihat bagaimana gambaran variabel dengan cara mencari rata-rata dari masing-masing variabel yaitu variabel kompetensi kepala sekolah dan variabel pencapaian standar mutu pendidikan. Kemudian diteliti korelasi antar variabel dengan menghitung koefisien korelasi untuk melihat apakah ada kontribusi atau tidak, dan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka digunakan rumus regresi.

H. LOKASI DAN SAMPEL PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Jembrana, provinsi Bali. Responden dalam penelitian ini adalah kepala SMP/MTs se-kabupaten Jembrana, yang jumlah keseluruhannya ada 30 kepala sekolah. Teknik sampling yang digunakan adalah *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2009: 85). Sedangkan teknik pengambilan sampelnya dengan menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi relatif kecil yaitu seluruh SMP/MTs se-kabupaten Jembrana ada 30 sekolah.